

MODAL SEBAGAI FAKTOR PRODUKSI DAN KEKUATAN

Daed JOESOEF

Ilmu ekonomi, bahkan ajaran-ajaran konvensional mengenai ekonomi pembangunan, menganggap modal semata-mata sebagai faktor produksi dan bukan sebagai kekuatan. Kalaupun di situ dibahas sebagai kekuatan, kekuatan ini diartikan sebagai sumber yang menghasilkan produk dan bukan sebagai sumber yang menju-
rus ke arah kekuasaan.

Antara modal dan produk terdapat "capital-output ratio" atau COR sebagai penghubung kuantitatif, dalam artian: jumlah produksi adalah hasil dari jumlah modal dibagi oleh COR. Dengan perkataan lain, apabila COR sudah diketahui dan tingkat produksi yang dikehendaki, sektoral ataupun global, sudah ditetapkan, maka jumlah modal yang diperlukan dapat dihitung. Bila kemudian ternyata tabungan nasional tidak cukup besar untuk mendukung jumlah modal yang diperlukan itu, kekurangannya diisi dengan modal asing yang didatangkan dari luar negeri. Maka dipandang dari sudut ini jelas bahwa secara aritmetis modal asing adalah "pelengkap" semata-mata dan begini pulalah kiranya jalan pikiran rencana PELITA II. Berhubung ia hanya berfungsi sebagai pelengkap, untuk menghadapinya sudah cukup dengan usaha dan kebijaksanaan yang ditujukan ke arah pengembangan dunia usaha serta pembangunan industri nasional, melalui, antara lain, penyediaan dana kredit yang besar dan persyaratan pinjaman yang relatif ringan untuk pengusaha lemah.

Ilmu politik, sebaliknya, melihat modal sebagai kekuatan dan kekuasaan, melalui pengertian "ekonomi dominan", dan hal ini banyak sedikitnya sesuai dengan tanggapan instinktif yang hidup di kalangan rakyat biasa, terutama sejauh yang mengenai modal asing. Kalaupun ilmu ekonomi melihat modal sebagai faktor dan sumber produksi dan mengabaikan aspek kekuatan dan kekuasaan yang juga dikandungnya, hal itu bukanlah karena ilmu ini keliru. Pandangan yang demikian dipegang teguh semata-mata untuk menjaga kemurnian disiplinnya sendiri, yang jelas hendak dibedakan dari disiplin pengetahuan lainnya. Yang keliru adalah bila kita hendak memecahkan persoalan masyarakat yang

begitu kompleks melalui intellegensi rasionil dan ilmiah dari hanya satu disiplin, dalam hal ini ilmu ekonomi. Perbuatan yang demikian sempit dapat membawa akibat yang fatal, lebih-lebih karena ilmu ekonomi, sebagaimana halnya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, tidak mempunyai "laboratorium" di mana dapat ditest lebih dahulu pikiran dan formule deduktifnya sebelum ia diterapkan kepada realitas kehidupan masyarakat.

Kiranya perlu disadari bahwa begitu kita memutuskan modal dan investasi asing boleh masuk, kita sebenarnya mulai dari saat itu sudah merubah dimensi dan sifat ekonomi kita, terlepas dari soal apakah modal tersebut hanya pelengkap atau tidak, juga terlepas dari soal apakah ia boleh diinvestir hanya di sektor tertentu dan sama sekali dilarang ditanam di bidang tertentu lainnya.

Dimensi ekonomi kita menjadi berubah karena dengan memberi izin modal asing untuk masuk, kita membuka ekonomi kita sehingga dunia usaha di mana bekerja pengusaha-pengusaha kita menjadi bertambah luas. Di dunia usaha yang bertambah luas itu mereka ini bertemu dengan lebih banyak usahawan asing, berhadapan dengan lebih banyak ragam berproduksi, lebih banyak cara memasarkan hasil produksi, tetapi dengan kondisi modal, teknik dan pengalaman yang tidak seimbang. Sifat ekonomi kita menjadi berubah karena dengan masuknya modal, ketrampilan teknis dan pengalaman asing itu ekonomi kita menjadi harus kompetitif, harus sanggup bersaing dengan ekonomi dan usaha yang datang dari luar. Dan bukan ini saja. Melalui masuknya modal dan investasi asing ini ekonomi kita menjadi berhadapan langsung tidak hanya dengan ekonomi asing yang immobil. Ia sebaliknya berhadapan dan terlibat dengan dunia usaha asing yang bergerak dengan ritme yang pesat sekali, terus menerus berubah, didorong dan dijiwai oleh suatu "romantisme teknologik". Hal ini menghadapkan para pengusaha kita dengan lebih banyak ketidakpastian terutama sejauh yang mengenai tuntutan dan metode management industriil modern.

Apabila dimensi dan sifat dari hal yang dihadapi telah berubah, tentu hakikat persoalan yang berhubungan dengan hal tersebut menjadi berubah pula dan karenanya bentuk dan cara pemecahan yang dipikirkan mengenai persoalan tersebut seharusnya menjadi lain. Bukan lagi kredit, penyuluhan, bimbingan guna pengembangan dunia usaha dan pembangunan industri, dalam bentuk usaha meningkatkan kegiatan dunia usaha, meningkatkan peranan golongan ekonomi lemah dan mengembangkan kegiatan koperasi,

mengutamakan pengembangan usaha-usaha yang banyak menyerap tenaga dan meningkatkan penyebaran kegiatan usaha ke daerah-daerah, seperti yang dirumuskan oleh rencana PELITA II. Semua usaha-usaha tersebut memang diperlukan, tetapi titik berat perhatian dan usaha sudah tidak boleh di situ lagi. Titik berat kini harus dialihkan pada usaha perumusan kembali sistim kerja birokratik-tekhnisi-pengusaha, bentuk, sistim dan mekanisme kerja lembaga-lembaga nasional, baik pemerintah maupun swasta, yang semuanya ditujukan ke arah menaikkan daya-bersaing dunia usaha dan industri nasional, baik bersaing di dalam maupun di luar negeri. Prestasi tidak lagi dinilai berdasarkan kuantitas produksi setiap bidang usaha dan sektor industri, tetapi berdasarkan resultat yang diperoleh di dalam berhadapan secara bersaing dengan dunia usaha dan industri asing, baik di dalam maupun di luar negeri.

Mungkin ada argumen yang mengatakan bahwa sebelum dipupuk untuk sanggup bersaing, adalah layak bila dunia usaha kita dibina dahulu untuk dapat berkembang. Jalan pikiran demikian menurut hemat kami tepat sebelum modal dan investasi asing diizinkan masuk ke dalam negeri. Sekarang ekonomi asing sudah ada dalam dunia usaha nasional, maka itu seharusnya sekaligus mengembangkan dan menaikkan daya bersaing dan dengan aksen pada usaha yang terakhir disebut itu. Harus diakui bahwa usaha menaikkan daya bersaing dunia usaha dan industri kita bukan soal yang sederhana. Setiap cabang usaha dan industri memerlukan cara dan perhatian yang tersendiri, yang secara khas berhubungan dengan situasi dan kondisi masing-masing yang unik. Maka itu untuk memikirkan cara menanggulangi persoalan ini kiranya perlu dibentuk satu komisi khusus, komisi modernisasi dunia usaha dan industri, yang anggotanya tidak hanya terdiri dari teoretisi yang berasal dari berbagai macam disiplin serta pejabat-pejabat dari berbagai departemen dan lembaga pemerintahan yang bersangkutan, tetapi juga para usahawan, karena mereka ini yang langsung merupakan pemain dan pemegang peranan; bila perlu dapat juga diikutsertakan usahawan asing yang sudah beroperasi di sini karena di antara mereka ini tidak jarang yang mempunyai iktikad baik, hanya kita saja yang tidak sanggup memanfaatkan pikiran dan pengalamannya. Hasil kerja komisi ini kelak seharusnya diserahkan kepada pemerintah untuk kemudian diolah dan diintegrir ke dalam proses perencanaan nasional kita, sesedikitnya sebagai pedoman penuntun di dalam mempersiapkan perencanaan.

Adapun misi pokok komisi khusus itu sesedikitnya adalah seperti berikut: pertama, memikirkan cara bagaimana supaya pemerintah, melalui kebijaksanaannya, dapat menciptakan satu milieu ekonomi, sosial dan politik yang tidak hanya memungkinkan perkembangan industri tetapi lebih-lebih membuat transformasi yang diakibatkan perkembangan itu menjadi lebih dapat diterima oleh orang-orang yang tersangkut dan terkena; dalam rangka ini perhatian yang khusus harus diberikan kepada beberapa aksi tertentu seperti politik penempatan tenaga dan formasi profesional, prasarana, riset industriil, penyuluhan ekonomi, dan lain-lain. Kemudian, memikirkan tindakan-tindakan langsung yang ditujukan guna mempercepat proses modernisasi sektor-sektor industri tertentu untuk mempermudah perubahan (conversion) yang hendak dijalankan oleh beberapa perusahaan dalam sektor industri tertentu. Selanjutnya, menggariskan "aturan bermain" yang diperlukan bagi perusahaan-perusahaan di dalam menjalankan fungsi produktifnya dengan seminimum mungkin hambatan birokratis dalam satu ekonomi dengan sistim pasar yang bersaing. Akhirnya, memikirkan cara mengembangkan dalam masyarakat sebagai keseluruhan satu mentalitas, satu spirit industriil, yang dalam dirinya mencerminkan pengertian dan kesadaran yang mendalam di kalangan para penanggung jawab dunia usaha, politik, pemerintahan, intelektual, tentang semua hal yang dituntut oleh pertumbuhan daya bersaing dari industri dan usaha nasional. Misi yang comprehensif seperti ini dimaksudkan supaya pertumbuhan dunia usaha dan industri nasional kelak tidak lagi merupakan satu faktor ketidakpastian berhubung ia adalah hasil dari kebijaksanaan parsial yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi satu faktor kebanggaan nasional berhubung ia adalah hasil dari suatu keseluruhan kebijaksanaan yang baik tujuan maupun alatnya ditetapkan secara konsisten.

Sebagai penutup kiranya perlu disimpulkan bahwa modal asing diperlukan untuk membangun ekonomi nasional. Walaupun secara aritmetis modal tersebut dapat dianggap sebagai hanya "pelengkap", tidak boleh dilupakan bahwa ia tetap merupakan satu "kekuatan". Namun begitu terhadap kekuatan itu kita tidak perlu takut dan menutup diri seperti siput yang masuk ke dalam rumah-kerangnya; yang kita perlukan adalah persiapan-persiapan yang tepat, bila tidak kita akan mengalami akibat-akibat yang fatal. Memikirkan persiapan-persiapan tersebut terang bukan pekerjaan yang sederhana, maka itu perlu dibentuk satu komisi khusus yang berdasarkan missinya dapat disebut sebagai "komisi

modernisasi dunia usaha dan industri". Adapun misi pokoknya bukanlah mengembangkan dunia usaha dan industri tetapi memperkuat daya bersaing dunia usaha dan industri nasional. Sebenarnya komisi seperti ini seharusnya sudah dibentuk dahulu pada saat kita memutuskan untuk mengizinkan pemasukan modal asing, yaitu pada saat diundangkannya undang-undang PMA. Namun belum terlambat bila dilihat dari sudut Repelita III di mana pembangunan sektor industri akan ditujukan pada usaha meningkatkan pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi; bila demikian pada saat itu kelak pasti sudah diperlukan sekali adanya kekuatan bersaing yang riil dari dunia usaha dan industri kita, baik di dalam maupun di luar negeri, baik di antara sesamanya maupun terhadap asing.

